



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional yang dilakukan secara baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025, perlu disesuaikan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, asumsi keuangan daerah, serta kondisi terkini perangkat daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, perlu diubah untuk mengakomodir kebutuhan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
 - c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
 - d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
 1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
 18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
 20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;

- 16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
- 17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Juni 2025
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

KAPANEWON PIYUNGAN

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Piyungan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Piyungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	60.000.000	0	0	0	0	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja Pembinaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persen	100	60.000.000	0	0	0	0	
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	<i>Mangayubagyo Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur</i>								
		Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Even	1	60.000.000	0	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan Bulan Agustus 2025
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	114.217.400	0	0	0	0	
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen							
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	<i>Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon</i>	Dokumen							
		<i>Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat kapanewon</i>	Dokumen							
		Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	1						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	Dokumen	1						
		Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB Kalurahan	Dokumen	1						
4.1.4.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persen	100	114.217.400	0	0	0	0	
4.01.04.5.01	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang didampingi	Dokumen	4	114.217.400	0	0	0	0	Belum ada penyaluran anggaran DAIS tahap I
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85.1	3.465.267.853		787.999.806	0	23%	
7.01.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	5.100.000	40	1.700.000	40%	33%	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Dokumen	7	2.550.000	3	850.000	42%	33%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen							
		Dokumen Keuangan								
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.550.000	2	850.000	40%	33%	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	2.924.009.433	24	655.282.073	24%	22%	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	15	2.874.749.433	15	643.392.073	100%	22%	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian</i>	<i>Orang/Bulan</i>							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	44.160.000	1	11.040.000	33%	25%	
'7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	5.100.000	5	850.000	23%	17%	
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	2.550.000	35	850.000	35%	33%	
'7.1.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	2.550.000	0	850.000	0	33%	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	141.474.826	18	23.583.500	18%	17%	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	<i>Komponen Instalasi Listrik</i>	<i>Paket</i>							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	8.195.170	1	2.100.000	25%	25%	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>Jenis</i>							
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	17.820.356	1	4.820.000	25%	27%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Bahan dan Peralatan kebersihan</i>	<i>Jenis</i>							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Paket	4	8.301.100	1	2.085.000	25%	25%	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Barang Cetak</i>	<i>Jenis</i>							
		<i>Penggandaan</i>	<i>Lembar</i>							
		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	12.355.200	1	2.961.000	25%	24%	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar</i>	<i>Jenis</i>							
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang undangan yng disediakan	Dokumen	1	2.400.000	0	600.000	0	25%	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Laporan hasil rapat</i>	<i>Dokumen</i>							
		<i>Perjalanan dinas dalam daerah</i>	<i>Orang/pe rjalanan</i>							
		<i>Perjalanan dinas luar daerah</i>	<i>Orang/pe rjalanan</i>							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	87.773.000	39	8.937.500	16%	10%	
7.01.01.2.06.11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Laporan penataan arsip</i>	<i>Dokumen</i>							
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.080.000	0	805.000	0	39%	
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	2.550.000	0	1.275.000	0	50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen	100	20.500.000	100	20.500.000	100%	100%	
7.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jenis</i>							
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	3	20.500.000	3	20.500.000	100%	100%	
7.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	194.649.744	25	45.427.583	25%	23%	
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Pembayaran Rekening Listrik</i>	<i>Bulan</i>							
		<i>Pembayaran Rekening Air</i>	<i>Bulan</i>							
		<i>Pembayaran Rekening Telephone</i>	<i>Bulan</i>							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	64.200.000	3	12.845.229	25%	20%	
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Jenis</i>							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	12.000.000	1	3.000.000	25%	25%	
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor</i>	<i>Dokumen</i>							
		<i>Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor</i>	<i>Dokumen</i>							
		<i>Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon</i>	<i>Dokumen</i>							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	4	118.449.744	1	29.582.354	25%	25%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	176.983.850	24	40.656.650	24%	23%	
7.1.1.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	<i>Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2</i>	<i>Unit</i>							
		<i>Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4</i>	<i>Unit</i>							
		Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	9	164.821.550	9	40.656.650	100%	25%	
7.01.01. 2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas</i>	<i>Unit</i>							
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	12.162.300	0	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Juli tahun 2025
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	35.050.000	12	1.000.000	12%	9,5%	
7.01.02 .2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100	24.800.000	12	1.000.000	12%	9.4%	
7.01.02. 2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>Laporan Koordinasi Forkompimkap</i>	<i>Dokumen</i>							
		Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Laporan	4	14.175.000	0	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								pada Bulan Mei 2025
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	Dokumen							
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	10.625.000	1	0	25%	22%	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Persen	100	10.250.000	11	1.000.000	11%	10%	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen							
		Masyarakat yang dilayani	Orang							
		Jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan	Laporan	2	10.250.000	0	1.000.000	0	10%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	98.754.500	50	29.767.500	50%	35%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100	77.479.500	50	29.767.500	50%	35%	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen							
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembara	10	19.067.500	10	19.067.500	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03. 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	Dokumen							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	58.412.000	1	10.700.000	25%	18%	
7.01.03 .2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	Persen	100	21.275.000	0	0	0	0	
7.01.03. 2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Dokumen							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi	Laporan	2	21.275.000	0	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Mei 2025
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	111.515.000	3	1.650.000	3%	1,5%	
7.01.04 .2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	111.515.000	3	1.650.000	3%	1,5%	
7.01.04. 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	Dokumen							
		Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	Dokumen							
		Laporan Penanggulangan Bencana	Dokumen							
		Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan	Laporan	5	111.515.000	0	1.650.000	0	1,5%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	8.062.500	0	0	0	0	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	8.062.500	0	0	0	0	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Repubik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Dokumen							
		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Repubik Indonesia	Orang	50	8.062.500	0	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2025
					3.892.867.253		820.417.306			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN : Menyesuaikan dengan kebijakan BPKPAD
- b. Kegiatan Danais akan dilaksanakan di TW II karena pada TW I belum ada penyaluran anggaran Dais dari pusat ke Kabupaten Bantul.
- c. Kurangnya anggaran untuk kegiatan peringatan HUT RI tahun 2025

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KAPANEWON PIYUNGAN KAB. BANTUL
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KAPANEWON PIYUNGAN							3.973.414.025,00	3.859.049.853,00	3.822.044.253,00	-151.369.775,00							4.749.269.175,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							150.000.000,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							150.000.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA A URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00							150.000.000,00		
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyuluhan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Piyungan		150.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kali/Desa	BAHUTUAN KEJARANCAH KULUS (DARI PENGRENTAH DAERAH PROVINSI)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyuluhan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Piyungan		150.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							40.000.000,00	40.000.000,00	113.717.400,00	73.717.400,00							66.040.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							40.000.000,00	40.000.000,00	113.717.400,00	73.717.400,00							66.040.000,00		
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA A URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berualitas				100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	113.717.400,00	26.040.000,00							66.040.000,00		
	4.01.04.5.01	Pemetaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Pemetaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	113.717.400,00	73.717.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyuluhan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Piyungan		66.040.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Komanten dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Komanten dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	113.717.400,00	73.717.400,00	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kali/Desa	BAHUTUAN KEJARANCAH KULUS (DARI PENGRENTAH DAERAH PROVINSI)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyuluhan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			66.040.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				85 angka	85 angka	3.691.614.628,00	3.466.667.853,00	3.444.099.853,00	261.464.647,00							3.842.479.175,00		
	7.01.01.2.01	Penerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja penerencanaan dan evaluasi perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyuluhan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon Piyungan		40.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				/ Dokumen	/ Dokumen	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kali/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyuluhan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			20.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				51 laporan	51 laporan	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kali/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyuluhan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			20.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	8	9	10					11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	3.038.373.806,00	2.924.009.433,00	2.924.009.433,00	-114.364.175,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Komunikasi Piyungan		2.548.088.175,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	16 Orang/bulan	0,00	2.874.749.433,00	2.874.749.433,00	2.874.749.433,00	Kab. Bantul, Piyungan, Sempu KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.478.088.175,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	44.160.000,00	44.160.000,00	44.160.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Sempu KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			65.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Sempu KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Komunikasi Piyungan		3.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7.01.01.2.05.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Sempu KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7.01.01.2.05.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				100 Persen	100 Persen	104.386.006,00	141.474.826,00	116.709.426,00	-37.617.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Komunikasi Piyungan		669.800.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	8.195.170,00	8.195.170,00	8.195.170,00	Kab. Bantul, Piyungan, Sempu KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			40.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEBUDAH	RKPD 2025	APBD 2025					NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
	7	UNSUB KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	17.820.366,00	13.235.956,00	13.235.956,00	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik; Berbasis Teknologi Informatika; Pemantapan Layanan Publik; Berbasis Teknologi Informatika			55.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	7	UNSUB KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	8.301.100,00	8.301.100,00	8.301.100,00	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			43.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
	7	UNSUB KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	12.355.200,00	8.345.700,00	8.345.700,00	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			45.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
	7	UNSUB KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			6.800.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
	7	UNSUB KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.06.0009	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (RKPD)	Jumlah Laporan Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RKPD				250 Laporan	55 Laporan	0,00	87.773.000,00	71.661.500,00	71.661.500,00	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			219.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.06.0009	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (RKPD)																			
	7	UNSUB KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.06.0010	Pembinaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pembinaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			30.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENBRETRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7		NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01.01.2.06.0010 Penastuseahan Arasp Dinamis pada SKPD																					
7		UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01		KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																					
7		UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01		KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah					100 Persen	100 Persen	24.000.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	-3.500.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengesahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon Pyurungan	200.000.000,00	KAPANEWON PYURUNGAN	
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diawalkan					7 Unit	3 Unit	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	Kab. Bantul, Pyurungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengesahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			200.000.000,00	KAPANEWON PYURUNGAN	
7		NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
7		UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01		KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					100 Persen	100 Persen	189.020.464,00	189.049.744,00	189.849.744,00	8.229.280,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengesahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon Pyurungan	305.000.000,00	KAPANEWON PYURUNGAN	
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diawalkan					12 Laporan	12 Laporan	0,00	64.200.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	Kab. Bantul, Pyurungan, Semua Ksd/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengesahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			80.000.000,00	KAPANEWON PYURUNGAN	
7		NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
7		UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01		KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor																					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Diawalkan					4 Laporan	4 Laporan	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	Kab. Bantul, Pyurungan, Semua Ksd/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengesahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			50.000.000,00	KAPANEWON PYURUNGAN	
7		NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor																					
7		UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01		KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diawalkan					4 Laporan	4 Laporan	0,00	118.449.744,00	118.449.744,00	118.449.744,00	Kab. Bantul, Pyurungan, Semua Ksd/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengesahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			175.000.000,00	KAPANEWON PYURUNGAN	
7		NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REKJUA OPD TAHUN 2023	PRAKARAAN CAPAIAN TARGET REKJUA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEBUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL			DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.09	Pembinaan Barang Misk Daerah Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang misk daerah				100 Persen	100 Persen	176.983.850,00	176.983.850,00	177.321.250,00	337.400,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelutupan.	Pelaksanaan Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	Kapenawon Pyunggan		278.591.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dines atau Kendaraan Dines Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dines atau Kendaraan Dines Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	9 Unit	0,00	164.821.550,00	164.821.550,00	164.821.550,00	Kab. Bantul, Pyunggan, Semus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelutupan.	Pelaksanaan Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	Kapenawon Pyunggan	170.000.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN		
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dines atau Kendaraan Dines Jabatan																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.09.0010	Pembinaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
	7.01.01.2.09.0010	Pembinaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	12.162.300,00	12.499.700,00	12.499.700,00	Kab. Bantul, Pyunggan, Semus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelutupan.	Pemertapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapenawon Pyunggan	108.591.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN		
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.09.0010	Pembinaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				95 Persen	95 Persen	36.050.000,00	36.050.000,00	36.050.000,00	129.950.000,00							166.000.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan				100 Persen	100 Persen	24.800.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelutupan.	Pemertapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapenawon Pyunggan	115.000.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	14.175.000,00	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pyunggan, Semus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelutupan.	Pemertapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapenawon Pyunggan	50.000.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	10.625.000,00	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pyunggan, Semus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelutupan.	Pemertapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapenawon Pyunggan	65.000.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpnakan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapenawon				100 Persen	100 Persen	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelutupan.	Pemertapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapenawon Pyunggan	50.000.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN		
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperintahan																			
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperintahan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pyunggan, Semus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelutupan.	Pemertapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapenawon Pyunggan	50.000.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN		
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat				100 Persen	100 Persen	100.612.000,00	98.754.500,00	92.529.500,00	135.236.000,00							235.750.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SARAPAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)					NASIONAL			DAERAH			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	2025	2026	2027													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pembudayaan Desa	Capaian Kinerja Pembudayaan Masyarakat Desa				100 Pansen	100 Pansen	77.362.000,00	77.479.500,00	77.517.000,00	-4.845.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapasawon Pyungon		265.000.000,00	KAPANEWON PYUNGON		
	7.01.03.2.01.0001	Penegakan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																					
			Jumlah Lembaga Konsyerasi yang Dipertemukan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga K onsyerasi elan	10 Lembaga K onsyerasi elan	18.950.000,00	19.067.500,00	19.067.500,00	117.500,00	Kab. Bantul, Pyungon, Semua Ksd/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	KAPANEWON PYUNGON			
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembudayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																					
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembudayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	50.412.000,00	50.412.000,00	53.449.500,00	-4.062.500,00	Kab. Bantul, Pyungon, Semua Ksd/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			175.000.000,00	KAPANEWON PYUNGON			
	7.01.03.2.03	Pembudayaan Lembaga Konsyerasi Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pembudayaan Lembaga Konsyerasi Kecamatan				100 Pansen	100 Pansen	23.150.000,00	21.275.000,00	20.012.500,00	-3.137.500,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapasawon Pyungon		30.750.000,00	KAPANEWON PYUNGON		
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	23.150.000,00	21.275.000,00	20.012.500,00	-3.137.500,00	Kab. Bantul, Pyungon, Semua Ksd/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.750.000,00	KAPANEWON PYUNGON			
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Keterlibatan dan Keterlibatan Kapasawon				100 Pansen	100 Pansen	98.775.000,00	111.515.000,00	98.585.000,00	146.225.000,00								245.000.000,00			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Peningkatan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan Keterlibatan dan keterlibatan umum				100 Pansen	100 Pansen	98.775.000,00	111.515.000,00	98.585.000,00	-180.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapasawon Pyungon		245.000.000,00	KAPANEWON PYUNGON		
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																					
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	98.775.000,00	111.515.000,00	98.585.000,00	-180.000,00	Kab. Bantul, Pyungon, Semua Ksd/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			245.000.000,00	KAPANEWON PYUNGON			
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				100 Pansen	100 Pansen	8.062.500,00	8.062.500,00	8.062.500,00	36.937.500,00								45.000.000,00			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengaturan Kepala Daerah	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				100 Pansen	100 Pansen	8.062.500,00	8.062.500,00	8.062.500,00	0,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapasawon Pyungon		45.000.000,00	KAPANEWON PYUNGON		
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Penguatan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Pemertahanan dan Pemertahanan Ketahanan Negara Republik Indonesia																					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Penguatan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Pemertahanan dan Pemertahanan Ketahanan Negara Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	8.062.500,00	8.062.500,00	8.062.500,00	0,00	Kab. Bantul, Pyungon, Semua Ksd/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			45.000.000,00	KAPANEWON PYUNGON			
			J U M L A H						3.973.414.028,00	3.869.049.853,00	3.822.044.253,00	-161.369.775,00								4.749.269.175,00			

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Panewu Piyungan

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL". The inner circle contains the text "KAPANEWON PIYUNGAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM
NIP. 196910311991021001